

**PERTENTANGAN ANTARA
CHRISTIAN SNOUCK HURGRONJE DAN JOHANES BENEDICTUS VAN HEUTSZ DALAM
PENETAPAN KEBIJAKAN KOLONIALISME BELANDA
DI ACEH (1898-1904)**

Irfan Dame - T. Junaidi - Sukirno

Penulis Pertama adalah Alumni Program Studi Pendidikan Sejarah Universitas Samudra
Penulis Kedua dan Ketiga adalah Pengajar pada Program Studi Pendidikan Sejarah
Universitas Samudra Langsa, Aceh.

ABSTRAKSI

Johanes Benedictus van Heutsz menerapkan perang frontal yang kejam dan mulanya hal ini mendapat dukungan Christian Snouck Hurgronje. Namun Christian Snouck Hurgronje mengajukan perubahan strategi penaklukan dengan menerapkan kebijakan politik Asosiasi untuk meredam perlawanan rakyat Aceh. Perbedaan pandangan antara Christian Snouck Hurgronje dan Johanes Benedictus van Heutsz telah dimulai dengan munculnya usulan politik asosiasi ini.

Tujuan dalam penelitian ini adalah Untuk mengetahui latar belakang munculnya pertentangan antara Christian Snouck Hurgronje dan Johanes Benedictus van Heutsz dalam menetapkan Kebijakan Kolonial Belanda di Aceh. Untuk mengetahui dampak terjadinya pertentangan dalam bidang Politik, Militer dan Sosial di Aceh.

Penelitian ini memperoleh hasil bahwa Yang melatarbelakangi pertentangan antara Christian Snouck Hurgronje dan Johanes Benedictus van Heutsz adalah disebabkan oleh latar belakang profesi yang berbeda antara keduanya dimana Christian Snouck Hurgronje memiliki dasar profesi ilmuwan yang bekerja dalam bidang orientalisme. Sementara itu Johanes Benedictus van Heutsz memiliki dasar profesi militer, keras, kejam, sadis adalah bagian dari konsep pemikirannya. Dampak dalam bidang Politik adalah munculnya perpecahan, politik saling meninggalkan, menjatuhkan antara keduanya. Dampak dalam bidang militer adalah merajalelanya agresifitas pasukan militer Belanda yang tidak terkontrol. Dampak dalam bidang sosial adalah munculnya suatu kondisi yang tidak aman bagi masyarakat Aceh.

Kata Kunci: *Aceh, Pertentangan, Kebijakan, Christian Snouck Hurgronje, Johanes Benedictus van Heutsz*

A. Konsep Pemikiran Christian Snouck Hurgronje Dalam Menangani Aceh

Christian Snouck Hurgronje memulai petualangan kamuflasenya pada 28 Agustus 1884, ia telah tiba di Jeddah. Sebagai seorang non muslim, Christian Snouck Hurgronje mengalami kendala untuk mendapatkan langsung mengenai hal informasi yang ia cari yakni informasi tentang keislaman khususnya mengenai masyarakat Aceh yang menganut Islam sebagai agama resmi bangsanya. Maka untuk itu Christian Snouck Hurgronje mengubah pola kehidupannya di Mekkah yakni dengan cara mengubah namanya menjadi Abdul Gaffar. Tidak cukup sampai disitu saja ia kemudian mengambil keputusan

yang sangat kontroversial yaitu mengucapkan dua kalimah syahadat, masuk Islam.

.....untuk masuk begitu saja ke tanah suci tidak mungkin baginya, sebab ia adalah seorang kristen. Lalu jalan satu-satunya pun ditempuh olehnya. Dia mengucapkan kalimat syahadat, menyatakan masuk Islam serta merubah namanya jadi Abdul Gaffar. Dia pun berhasil masuk ke Mekkah sambil melakukan perintah-perintah agama Islam sebagaimana lainnya tujuannya adalah bagaimana berhasil bergaul dengan mukmin Aceh disana (Muhammad Said, 2007: 100)

Sesuai dengan penjelasan dalam kutipan diatas, sangat jelas dengan berpura-pura menganut agama Islam, Christian

Snouck Hurgronje atau Abdul Gaffar dapat leluasa bergaul dengan umat muslim, baik umat muslim Mekkah, Jawa maupun dari Aceh. Dari pergaulan inilah Christian Snouck Hurgronje mendapatkan jawaban dari sekelumit informasi yang ia cari. Lebih eksplisit dijelaskan dalam kutipan berikut.

Di Mekkah ia (Christian Snouck Hurgronje) menjumpai para jama'ah haji Indonesia yang telah menimbulkan keheranan pada orang-orang disana dengan cerita-cerita mereka tentang perang Belanda di Aceh. lalu timbullah sebuah gagasan padanya untuk melakukan penyelidikan di Aceh seperti yang dilakukannya di Mekah dan di Jidah

(Paul van't Veer, 1969: 225)

Berdasarkan petikan diatas, Christian Snouck Hurgronje semakin memiliki hasrat untuk mengetahui lebih jauh dan lebih radikal mengenai masyarakat Aceh demi sebuah tugas yang diembankan pemerintah Belanda padanya. Christian Snouck Hurgronje adalah salah satu orientalis terkemuka Belanda yang mendapatkan suatu kesempatan untuk mengaplikasikan ilmu pengetahuan di Hindia Belanda dan Aceh. Jabatan yang diembannya adalah Penasehat Urusan Penduduk Asli dan Arab, merupakan jabatan yang cukup bergengsi kala itu. Snouck Hurgronje adalah ahli ketimuran yang merancang strategi penaklukan terhadap kedaulatan Aceh. Tahun 1891 Snouck Hurgronje mulai menyusun laporan awalnya tentang kehidupan sosial masyarakat Aceh secara umum baik meliputi adat istiadat, agama, sosial dan politik. Hasil daripada temuan penelitiannya tersebut disusun dalam sebuah laporan berjudul '*verslag omtrentreligieus politieke toestanden in atjeh*' yaitu laporan tentang keadaan politik dan agama di Aceh.

Pendirian Snouck yang paling asli tentang Islam terdapat dalam *Verslag Aceh*. Disitu Snouck mencibir orang Aceh dan Islam. Celaan mengenai Aceh dan Islam mewarnai laporannya itu sehingga memotifasi pemerintah Belanda untuk meneruskan perang penaklukan Aceh. Pada dasarnya, pola operasi orientalis angkatan Snouck menggunakan metode ilmiah untuk memisahkan umat

Islam dari spirit ajarannya, baik yang bersifat politik maupun hukum. Snouck mengajukan gagasan politik Asosiasi yang maksudnya mengubah orientasi budaya umat Islam ke arah kebudayaan Barat, yang diyakini Snouck sebagai paling luhur. (Ridwan Saidi, Rizki Ridiasmara, 2009: 95)

Berdasarkan kutipan diatas Christian Snouck Hurgronje memiliki pendapat dan pendirian yang buruk terhadap Islam dan masyarakat Aceh secara khusus. Hasil penelitiannya selama berada di Aceh dan Hindia-Belanda digunakan semaksimalnya untuk kepentingan kolonialisme Belanda baik di Aceh maupun di Nusantara secara umum. mengenai hal ini dijelaskan lebih eksplisit oleh sejarawan kontemporer Belanda, Dr. Van Koningsveld dalam Ridwan Saidi, Rizki Ridiasmara, (2009: 94) bahwa "Snouck membuat laporan penelitian ganda, misalnya tentang Aceh, Snouck menulis dua jilid buku tebal *de Atjehers* berisi laporan ilmiah mengenai masyarakat Aceh, dan buku ini dipublikasikan. Ternyata Snouck juga menulis *Verslag Aceh* sebagai laporan kepada pemerintah Belanda tentang alasan-alasan mengapa Aceh harus diperangai *Verslag Aceh* berbeda dengan *de Atjehers*"

Muhammad said (2007: 104-105) menjelaskan Inti sari pendapat Snouck Hurgronje mengenai penyelesaian Aceh sebagai berikut;

1. Hentikan usaha mendekati sultan dan orang dekatnya. Menurut Snouck Hurgronje, Sultan sebetulnya tidak berkuasa. Kalau dia dapat diajak damai, tidaklah dengan sendirinya berarti bahwa yang lain-lain akan turut serta berdamai.

2. Jangan mencoba-coba mengadakan perundingan dengan musuh yang aktif, terutama jika mereka terdiri dari para Ulama. Sebab keyakinan merekalah yang menyuruh mereka melawan Belanda. Terhadap mereka haruslah peluru yang bicara.

3. Rebut kembali Aceh Besar

4. Untuk mencapai simpati rakyat Aceh, giatkan Pertanian, Kerajinan dan Dagang.

Empat hal inilah yang menjadi pokok gagasan Christian Snouck Hurgronje diawal keterlibatannya merumuskan kebijakan politik dan militer Belanda di Aceh. Christian Snouck Hurgronje berpendapat bahwa sultan tidak memiliki wewenang yang kuat untuk melakukan negosiasi dengan Belanda karena sultan sangat tergantung pada empat pembesar Kerajaan Aceh Darussalam yakni; Teungku Kali Malikul Adil, Teuku Ne', Panglima Meusengit Raja Dan Imam Leung Bata (Muhammad Said 2007: 104)

Keterangan mengenai isi gagasan Snouck Hurgronje tentang posisi sultan yang tidak mutlak dalam mengambil segala kebijakan, karena sebelum sultan mengambil keputusan tertentu, mutlak harus ada persetujuan dari Teungku Kali Malikul Adil yang membidangi keagamaan Islam, Teuku Ne selaku pembesar kerajaan', Panglima Meusengit Raja dan Imam Leung Bata. Apabila keempat pembesar kerajaan ini sudah setuju terhadap suatu kebijakan maupun keputusan barulah sultan menggunakan haknya selaku pimpinan kerajaan. Adanya anggapan-anggapan Kelemahan-kelemahan posisi Sultan dalam kondisi tersebut diatas diperjelas lagi oleh sejarawan Belanda dalam kutipan berikut ini.

Dalam laporan ini antara lain Snouck menyatakan bahwa sultan Aceh tidak menjalankan kekuasaan nyata atas daerah-nya, jadi harus diabaikan. Selanjutnya bahwa 'partai perang' terdiri dari gerombolan-gerombolan perlawanan yang oleh pemimpin agama dihasut untuk melakukan perang suci melawan kaum kafir (orang-orang Belanda)...para penguasa Aceh yang sebenarnya, menurut Snouck adalah raja-raja setempat (*ulebalang-ulebalang*), suatu kontra gerilya yang aktif, diperintahkan menjarah semua kawasan pantai sampai kepedalaman Aceh yang terjauh. Tetapi dalam hal ini sasaran-sasaran sipil harus tetap dihormati mengingat bahwa Aceh yang sudah ditaklukkan akan dapat diperintah pada kemudian hari. (van Koningsveld, 1989: 258)

Sesuai dengan kutipan ini Snouck memandang bahwa penguasa Aceh secara

realitas adalah Uleebalang. Dalam perkembangan kekuasaan Belanda yang semakin brutal, telah menciptakan malapetaka yang lebih besar bagi rakyat Aceh, baik bagi rakyat yang memang melakukan perlawanan bersama ulama maupun bagi rakyat yang tidak aktif dalam perlawanan. Dampak yang paling nyata adalah meningkatnya kebencian rakyat pada Belanda.

Hal ini dipandang oleh Christian Snouck Hurgronje sebagai ganjalan terberat dalam upaya pelaksanaan politik Asosiasi yaitu politik yang mencoba mendekati rakyat Aceh mulai kalangan bawah sampai kalangan bangsawan yang masih setengah hati dengan Belanda. Dengan politik ini harapan Belanda untuk berjaya di Aceh semakin terbuka demikian pandangan orientalis Belanda dan penasehat ketimuran Belanda di Aceh.

Melihat gejala-gejala yang kompleks bagi tujuan pelaksanaan politik Asosiasi maka Snouck Hurgronje memberikan gagasannya yang selanjutnya berupa; politik kontra gerilya harus dihapuskan, pelarangan merampas harta rakyat Aceh yang tidak aktif melawan belanda, melarang pengadaan kerja paksa Rodi yang dinilai bertentangan dengan langkah-langkah implementasi politik asosiasi.

Kelompok yang dipelopori oleh C. Snouck Hurgronje beranggapan bahwa perlawanan-perlawanan bersenjata dari (Aceh) dalam menentang pemerintah kolonial Belanda, terutama adalah digerakkan oleh sistem nilai agama Islam. Dan perlawanan-perlawanan ini hanya mungkin dapat diselesaikan atau dikurangi, kalau golongan bangsawan atau pemuka-pemuka adat dari daerah setempat (yang dalam hal ini di Aceh golongan *Uleebalang*) dapat di tarik ke dalam orbit kebudayaan dan sistem nilai mereka (sistem nilai barat atau Belanda). Untuk ini, kelompok tersebut menyarankan kepada pemerintah Hindia Belanda agar dapat menciptakan suatu golongan elit baru yang dibina dan dididik dengan kebudayaan dan sistem nilai mereka. Dan dengan sistem ini diharapkan mereka yang telah dibina dan dididik itu tidak lagi mengikuti seruan pemimpin agama Islam (para ulama)

(Rusdi Sufi, Agus Budi Wibowo, 2009: 71)

Tujuan utama yang termaktub dalam kutipan diatas adalah adanya upaya untuk memisahkan para Ulama dengan umat Islam. Serta adanya rencana untuk merubah pola pikir masyarakat Aceh yang dipusatkan pada sistem kebudayaan Belanda. Yang kemudian mereka harapkan adalah masyarakat Aceh tidak lagi mengindahkan fatwa-fatwa yang berasal dari ulama, karena apabila umat dan ulama masih bersatu padu maka sangat susah untuk dapat menguasai Aceh.

Perubahan paradigma mengenai rumusan-rumusan kebijakan yang diarahkan oleh Christian Snouck Hurgronje terhadap pemerintah sipil dan militer di Aceh menandai pergeseran strategi penaklukan terhadap pasukan gerilyawan Aceh. Pergeseran yang dimaksud adalah ketika awal penugasan Christian Snouck Hurgronje sebagai Penasehat Pemerintah Belanda Urusan Pribumi dan Arab ia menyarankan agar dilakukan strategi kontra gerilya yang bersifat ofensif, penyerangan besar-besaran pada basis-basis kekuatan Aceh. Namun seiring perkembangan kondisi politik dan keamanan yang memburuk secara berkepanjangan Christian Snouck Hurgronje akhirnya merubah haluan pemikiran strategi penaklukan, yaitu penaklukan secara halus.

Yang paling menarik dari Snouck, adalah ambivalensinya dalam memberikan nasehat. Awal penyelesaian perang Aceh, Snouck dengan gagah memerintahkan militer Belanda untuk memusnahkan kantong-kantong perlawanan secara keras, agar masyarakat biasa takut berhubungan dengan mereka. Akhir perang Snouck pula yang mengatakan bahwa kekerasan akan melahirkan rasa kebencian mendalam rakyat terhadap Belanda, makanya harus dihentikan. Masalah takluk atau tidak dan ambivalensinya nasehat Snouck, menampilkan sebuah gambaran lain bahwa secara politik ada hubungan sipil dan militer Belanda yang terganggu di Aceh saat itu. (Muliadi Kurdi, 2009: 169)

Berdasarkan data yang bersumber dari Muliadi Kurdi tersebut diatas jelas ada masalah yang menghimpit serius antara sipil (Snouck Hurgronje) dan militer (Johannes Benedictus Van Heutsz). Hubungan yang menggambarkan mulai berkurangnya harmonisasi antar keduanya. Terbukti dengan adanya upaya meninggalkan cara-cara militerisme dalam penyelesaian perang Belanda di Aceh.

Snouck Hurgronje beranggapan bahwa perang yang sedang berlangsung di Aceh dapat diselesaikan dengan cara-cara yang lebih 'terhormat' yakni perbaikan nama baik pemerintahan Belanda itu sendiri melalui berbagai program yang seakan-akan pro rakyat. Namun dibalik itu tersimpan rencana yang besar sebuah penaklukan secara halus.

Cara ini hanya dapat dilaksanakan melalui westernisasi orang-orang pribumi (Aceh), adanya proses meninggikan berbagai ragam corak kebudayaan barat jauh diatas kebudayaan bangsa Aceh itu sendiri. Sehingga diharapkan pola pikir masyarakat akan dinamis meninggalkan budaya-budaya ketimuran yang sarat dengan Islam. Menurut (Tim NPSI, 2010: 57) bahwa "Dalam usaha melapangkan jalan kearah asosiasi, pengajaran barat merupakan alat utama untuk melancarkan modernisasi dan menyisihkan hambatan dari kekuatan tradisional"

Hambatan dari kekuatan tradisional yang dimaksud adalah golongan ulama dan uleebalang-uleebalang yang senantiasa mengobarkan semangat perang sabilillah menentang penjajah Belanda yang juga merupakan golongan kapir. Maka pengaturan utamanya terletak pada pembangunan sistem pendidikan yang berpola barat yang di usung oleh Belanda untuk sebuah perubahan pola pikir tradisional menjadi orientasi barat.

B. onsep Pemikiran Johannes Benedictus van Heutsz dalam Menangani Aceh

Johannes Benedictus van Heutsz seorang Gubernur Sipil dan Militer yang berhasil mengubah dinamika kolonialisme Belanda di Aceh. Suatu strategi perang yang ia jalankan mampu membawa hasil gemilang dalam konteks Belanda. Hal tersebut mengubah posisi pasukan Belanda dalam pertempuran di

medan perang, dari kondisi sangat sulit kemudian menjadi perlahan-lahan berhasil mendominasi dan menduduki konsentrasi kantong-kantong perjuangan gerilyawan Aceh.

Hal ini tentu saja tidak terlepas dari strategi terukur yang terencana dengan sangat cermat oleh Johannes Benedictus van Heutsz yang kemudian dibantu oleh penasehatnya Snouck Hurgronje. Johannes Benedictus van Heutsz memiliki gairah perang yang besar, dan hal itu telah ada dalam diri Johannes Benedictus van Heutsz jauh sebelum dilantik menjadi penguasa sipil dan militer di Aceh.

Van Heutsz adalah petempur murni yang menjadi icon dalam jajaran Mareschause...setelah tiga periode bertugas dengan gemilang dia menerbitkan brosur, *De Onderwerping van Atjeh* (1892-1893) yang membahas penaklukan Aceh Besar dapat dilakukan dalam waktu setahun tanpa perlu pasukan tambahan. (Harry Kawilarang, 2010: 127)

Berdasarkan kutipan tersebut diatas dapat dianalisa bahwa Johannes Benedictus van Heutsz memiliki pemikiran opensif terkait permasalahan Aceh. Hal tersebut merupakan konsep perang anti gerilya dengan mengandalkan pasukan khusus *Korp Mareschause*. Tentu dapat ditarik satu analisa mengenai konsep pemikiran Johannes Benedictus van Heutsz untuk menegakkan kedaulatan Belanda secara utuh, yaitu konsep penaklukan dengan kekerasan. Namun semua yang tercantum dalam brosurnya tersebut meleset jauh dari perhitungan van Heutsz dalam upaya menguasai Aceh yakni perang selama 69 tahun lamanya.

Johannes Benedictus van Heutsz menjelaskan pendirian militerisnya, yang perlu dilakukan oleh tentara Belanda adalah mematahkan segala bentuk perlawanan gerilya Aceh terutama di Aceh Besar terhadap kolonialisme Belanda. Oleh karena itu secara praktis sistem lini konsentrasi tidak lagi diperlukan karena hanya menjadikan mereka objek serangan gerilya Aceh. Setelah berhasil menguasai wilayah-wilayah yang dikuasai Aceh, maka mutlak diperlukan penempatan pasukan kolonne yang mobil untuk

melakukan tekanan yang kuat pada gerilya Aceh. Pasukan kolonne mobil tersebut secara berkesinambungan melakukan patroli pada setiap penjuru untuk memaksakan keamanan. (Paul van't Veer, 1969: 235)

Dalam petikan diatas sangat tergambar dengan jelas karakter strategi Johannes Benedictus van Heutsz dalam upaya menaklukkan Aceh. Diantaranya berupa serangan frontal anti gerilya yang ditugaskan untuk merampas wilayah-wilayah yang dikuasai pasukan Aceh. Tindakan kekerasan ini kemudian membawa malapetaka yang besar bagi rakyat Aceh secara umum. Perampasan harta benda, penangkapan serta syahidnya para ulama-ulama Aceh menambah daftar panjang kerugian-kerugian yang diderita rakyat selama rentang dimulainya perang Belanda yang keempat (1898-1904).

Salah satu bagian dari konsep perang frontal yang menjadi andalan Johannes Benedictus van Heutsz adalah taktik bumi hangus terhadap pemukiman-pemukiman penduduk yang disinyalir memiliki kedekatan dengan gerilya Aceh, baik secara emosional maupun dalam bentuk material. Dalam bentuk emosional kedekatan ini berupa munculnya rasa simpati yang besar terhadap orang-orang yang rela berkorban apa saja untuk kemerdekaan harga diri bangsa Aceh. Dalam bentuk material, kedekatan ini berupa adanya bantuan-bantuan berupa materi kepada gerilya.

Menurut kapten Kruisheer yang memberikan komentar mengenai taktik bumi hangus Johannes Benedictus van Heutsz dalam Paul van't Veer (1969: 252) "tindakan-tindakan kita itu ta' sedikitpun terlihat pantas". Lebih jelas Paul van't Veer (1969: 251) menggambarkan suasana suatu wilayah di sekitar Aceh Besar setelah insiden bumi hangus Johannes Benedictus van Heutsz adalah sebagai berikut; "... barang siapa hendak mencari Lam Pisang pada tanggal 3 juni, ia akan menjumpai sebuah lapangan besar ditanah gundul yang telah hangus"

Petikan diatas menggambarkan bahwa tindakan Johannes Benedictus van Heutsz dan pasukannya tersebut sangat kejam dan tidak berprikemanusiaan. Melakukan bumi hangus terhadap pemukiman penduduk di Lam Pisang merupakan tindakan terlarang yang

tercantum dalam aturan perang internasional sekalipun. Kerugian yang diderita rakyat semakin parah akibat praktek bumi hangus ini.

Menjelang berakhirnya masa jabatan Johannes Benedictus van Heutsz sebagai Gubernur sipil dan militer di Aceh, terjadi kerenggangan hubungan politik dengan penasehat ahlinya, Christian Snouck Hurgronje. Hal ini berpengaruh besar terhadap konsep penanganan permasalahan Aceh dalam pemikiran Johannes Benedictus van Heutsz. Sebagai dampak lebih lanjut dari ketidakharmonisan antara kedua sentrum pemimpin dan pengambil kebijakan kolonialisme Belanda di Aceh itu adalah munculnya egosentris pada keduanya yang berimbas pada pengambilan kebijakan politiknya. Johannes Benedictus van Heutsz mengambil kebijakan tanpa menghiraukan saran-saran dari Snouck Hurgronje, akibatnya oleh Snouck Hurgronje juga membiarkan van Heutsz dengan keputusannya.

Beberapa konsep pemikiran Johannes Benedictus van Heutsz adalah sebagai berikut; van Heutsz tidak memperhitungkan adanya *korte verklaring* atau perjanjian pendek yang melarang setiap aparat pemerintah Sipil dan Militer Belanda di Aceh untuk berhubungan komunikasi dengan setiap orang yang menentang kekuasaan Belanda di Aceh dalam hal ini termasuk sultan dan para pengikutnya. Menolak adanya upaya pelaksanaan politik Asosiasi yang digagas oleh Snouck Hurgronje yang tak lain adalah penasehatnya sendiri. Dan mempersiapkan pengangkatan Gotfried van Daalan sebagai calon Gubernur Sipil dan Militer penggantinya.

C. Pertentangan dalam hal Penetapan Kebijakan

Hubungan politik antara Christian Snouck Hurgronje dan Johannes Benedictus van Heutsz dalam rentang waktu tahun (1898-1904) diwarnai oleh dua kondisi. Dua suasana yang berbeda bahkan sangat bertolak belakang. Dimana ketika permulaan awal kebersamaan mereka terjalin hubungan duet pemimpin yang harmonis. Segala sesuatu mengenai kebijakan politik kolonialisme Belanda di Aceh mereka rancang bersama-sama.

Tidak ada pertentangan paham di awalnya, setiap nasehat politik Christian Snouck Hurgronje dijalankan dengan sebaik-baiknya oleh Johannes Benedictus van Heutsz. Hal ini sangat tidak terlepas dari kesamaan visi mereka mengenai penanganan perang di Aceh. Visi Christian Snouck Hurgronje sangat jelas dalam hasil penelitiannya yang berjudul *Atjeh Verslag* didalamnya terdapat hasil penelitian yang akurat tentang Aceh serta saran-saran terhadap kesulitan-kesulitan yang dihadapi tentara Belanda.

Johannes Benedictus van Heutsz juga memiliki pandangan dan visi yang tertulis dalam brosurnya *De Ondewerping Van Atjeh*. Baik pandangan Johannes Benedictus van Heutsz maupun pandangan Christian Snouck Hurgronje sudah merupakan dua konsep besar yang dapat saling mendukung. Namun tentu saja setiap sebuah perencanaan yang besar harus dikelola oleh orang yang mumpuni serta kompak dalam berbagai kondisi dan situasi.

Seiring dengan semakin terpuruknya kondisi Aceh akibat perlakuan yang sangat kejam dan kasar dari tentara Belanda, masyarakat umum sekalipun tidak luput dari perlakuan kekejaman Johannes Benedictus van Heutsz. Namun ternyata perlawanan gerilyawan yang dibantu oleh masyarakat tetap saja tidak surut. Kekejaman-kekejaman yang dipraktekkan Johannes Benedictus van Heutsz ternyata tidak selalu mendapat dukungan dari Christian Snouck Hurgronje.

Setelah orientalis ini menganalisa bahwa semakin kejam perlakuan Belanda ternyata semakin memunculkan benih-benih kebencian dan perlawanan yang semakin meningkat terhadap Belanda. Meskipun di awalnya Snouck Hurgronje sangat menginginkan penaklukan secara total. Namun strategi penaklukan harus dirubah.

.....Snouck beranggapan pelumpuhan perlawanan dengan kekerasan akan melahirkan implikasi yang tambah sulit diredam. Akhirnya taktik militer Snouck memang dirubah. Snouck membalikkan metode, dengan mengusulkan agar di Aceh diterapkan kebijakan praktis yang dapat mendorong hilangnya kebencian masyarakat Aceh karena tindakan penaklukan secara bersenjata...Pendekatan tanpa kekerasan,

otomatis pengurangan pasukan harus dilakukan. Sedang van Heutsz orang yang sangat menentang hal itu. Ia bahkan mengusulkan status di Aceh tetap dipegang Gubernur militer. Sepanjang 1898-1903, ada sisi sejarah yang gelap. Snouck yang mendampingi van Heutsz dalam konteks pengaruh Snouck pada pemerintah atas perang Aceh-terlibat konflik sipil-militer yang tergambar lewat tokoh Snouck yang sipil dan militer yang tergambar lewat van Heutsz. Situasi ini tidak bisa disembunyikan. (Muliadi Kurdi, 2009: 174, 175)

Berdasarkan kutipan diatas dapat dianalisis bahwa terjadi perubahan paradigma politik yang dirumuskan oleh Christian Snouck Hurgronje. Perubahan-perubahan tersebut terjadi bukan bersumber pada rasa empati kepada rakyat Aceh akan tetapi lebih kepada dorongan taktik halus yang dianggap kelak dapat menguntungkan pihak Belanda. Selain daripada itu ternyata usulan-usulan yang dilontarkan oleh Christian Snouck Hurgronje mendapat tentangan dari rekan yang kemudian menjadi rival politiknya, Johannes Benedictus van Heutsz.

Christian Snouck Hurgronje berpandangan bahwa ada cara baru yang lebih efektif untuk melunakkan bangsa Aceh yakni dengan jalan melaksanakan politik Asosiasi. Ia berpandangan bahwa harus ada perubahan strategi dan kebijakan mengenai hal ini. Yaitu dari strategi penaklukan secara frontal kepada strategi mengambil hati rakyat Aceh secara umum yang dituangkan sepenuhnya dalam konsep politik Asosiasi. Kekejaman tidak menyelesaikan permasalahan melainkan memperparah situasi. Terkait hal ini Christian Snouck Hurgronje lebih menyetujui kamufase dengan memperlakukan rakyat Aceh dengan lebih halus guna mengambil hati rakyat Aceh.

Adapun upaya pendekatan secara halus yang dicanangkan tentulah harus melakukan pengurangan dan penarikan pasukan non organik yang sebelumnya didatangkan dari Batavia. Hal-hal semacam ini tidak disetujui oleh Johannes Benedictus van Heutsz karena tidak sesuai dengan konsep perang frontal yang diunggulkannya. Pertentangan-pertentangan pemikiran semacam ini

selanjutnya memicu kerenggangan dan ketidakharmonisan antara keduanya.

Metode yang diusulkan oleh Christian Snouck Hurgronje ini tetap saja ditentang oleh Johannes Benedictus van Heutsz. Penentangan ini menandai awal ketidakharmonisan antara keduanya dalam penetapan kebijakan kolonialisme Belanda di Aceh. Johannes Benedictus van Heutsz yang memiliki orientasi perang beranggapan bahwa usulan tersebut seperti menunjukkan ketidakmampuannya dalam mengenggam Aceh.

Hal ini berarti mencoreng reputasi Johannes Benedictus van Heutsz sebagai penguasa militer di Aceh. Sebagaimana terdahulu Johannes Benedictus van Heutsz pernah menulis brosur mengenai penaklukan Aceh tidaklah sulit. Tentulah hal pemikiran yang dikeluarkan oleh Christian Snouck Hurgronje untuk merubah strategi penaklukan tersebut sangat bertolak belakang.

Johannes Benedictus van Heutsz berpandangan bahwa usulan Snouck hanyalah menciptakan ambivalensi dalam pemetaan kebijakan politik dan militer di Aceh. Pemikiran-pemikiran Snouck dianggap melemahkan kedudukannya. Itulah sebabnya menentang keras pemikiran Snouck. Bahkan lebih progresif Johannes Benedictus van Heutsz tetap pada suatu pendirian bahwa strategi militer yang keras tetap harus dipertahankan karena bagi gerilyawan Aceh haruslah dihadapi dengan kekerasan operasi militer. Hal-hal yang berkaitan dengan Operasi-operasi militer seperti ini senantiasa diwariskan oleh Johannes Benedictus van Heutsz pada Gubernur militer selanjutnya, van Daalan.

Salah satu kebijakan kontroversional dalam paradigma Christian Snouck Hurgronje yang diambil oleh Johannes Benedictus van Heutsz adalah terbentuknya komunikasi antara sultan Muhammad Daud Syah dan Gubernur Sipil dan Militer tahun 1903. Christian Snouck Hurgronje menilai bahwa van Heutsz telah melanggar peraturan *korte verklaring* yang melarang setiap pejabat pembuat kebijakan di Aceh menjalin komunikasi dengan musuh Belanda dalam hal ini Sultan Muhammad Daud Syah.

Namun ternyata Johannes Benedictus van Heutsz tetap menjalin komunikasi sebagaimana terlarang dalam perjanjian korte vergklaring. Dalam perjanjian yang dinamakan korte vergklaring ini bermakna pelarangan setiap pengambil kebijakan kolonialisme Belanda untuk berkomunikasi tawar-menawar mengenai hal apa saja dengan semua musuh-musuh Belanda. Ia kemudian melaksanakan perundingan dengan Sultan Muhammad Daud Syah. Namun upaya Belanda mendekati sultan ternyata tidak membuahkan apapun seperti yang diharapkan oleh Johannes Benedictus van Heutsz.

.....bahwa Aceh tidak mengakui adanya perubahan-perubahan yang diperbuat pemerintah Hindia Belanda di daerah kedaulatannya, termasuk perjanjian-perjanjian yang kelak dibuat Hindia Belanda dengan para *uleebalang* yang disebut "Plakat Pendek". Dari sini dapat dibuktikan bahwa Sultan tidak pernah melakukan perubahan perjanjian dengan Hindia Belanda, apalagi penyerahan kedaulatan atau penyerahan Aceh kepada Belanda tidak pernah ditanda-tangani oleh Sultan (Anas Machmud, 1988: 42)

Berdasarkan keterangan dalam kutipan diatas jelas bahwa Kerajaan Aceh Darussalam tidak pernah mengakui kekuasaan dan kedaulatan Belanda di Aceh serta sultan Muhammad Daud Syah tidak pernah menandatangani Nota penyerahan kedaulatan Aceh pada Belanda. Khusus mengenai hal ini penting untuk digaris bawahi bahwa Aceh tetap memiliki kedaulatan penuh karena tidak pernah diserahkan pada bangsa manapun. Adapun sultan Muhammad Daud Syah bersedia turun gunung karena adanya suatu tindakan buruk dari Belanda berupa ancaman pembunuhan dan pembuangan terhadap anggota keluarga sultan apabila tidak mengindahkan ancaman tersebut.

Meskipun melakukan proses tawar-menawar dengan sultan Muhammad Daud Syah, Johannes Benedictus van Heutsz tetap tidak merasa melanggar aturan yang digariskan dalam *korte vergklaring*, bahkan sebaliknya ia menganggap kedatangan Sultan Muhammad Daud Syah di Kutaraja pada Gubernur Militer adalah sebuah Prestasi yang sangat layak mendapatkan apresiasi besar dari

pemerintah di negeri Belanda. Bagaimana tidak dalam catatan sejarah kolonialisme mereka di bumi Aceh baru dalam kepemimpinannya Sultan berhasil didatangkan. Dan hal ini merupakan sudah lama mereka tunggu-tunggu.

Hal yang menjadi alasannya adalah belum ada Jenderal yang memimpin pasukan kolonial yang mampu dan berhasil memaksa Sultan Aceh untuk datang ke Kutaraja. Bahkan lebih buruk dari itu Belanda harus menelan kekalahan dengan tewasnya empat Jenderal yaitu Kohler, Pel, de Moulin, dan Demmeni serta seorang jenderal yang mengalami cacat mata pada mata yang kemudian mendapat gelar jenderal mata satu, jenderal Heijden.

Selama ekspansi militer mereka di Aceh. Mengenai keberhasilannya tersebut Johannes Benedictus van Heutsz tentu berbangga hati karena namanya telah harum di negeri Belanda. Tapi tetap saja dimata Christian Snouck Hurgronje justru ia mendapat penilaian buruk. Kebijakan yang diambilnya tetap bertentangan dengan kesepakatan awal yang tertuang dalam korte vergklaring.

Proses kedatangan sultan Muhammad Daud Syah disinonimkan oleh Johannes Benedictus van Heutsz sebagai keruntuhan dan kejatuhankerajaan Aceh Darussalam sepenuhnya pada pemerintah Belanda. Ia menganggap dengan datangnya sultan Muhammad Daud Syah di Kutaraja berarti kedaulatan Kerajaan Aceh Darussalam telah berakhir. Namun hal semua itu merupakan kekeliruan terbesar oleh Johannes Benedictus van Heutsz.

Johannes Benedictus van Heutsz dan pandangan-pandangan tersebut sesungguhnya telah tersesat dalam menilai kesediaan kedatangan sultan kerajaan Aceh Darussalam Muhammad Daud Syah. Adalah sesuatu yang sangat terlalu dini menganggap kedaulatan Aceh telah berakhirnya karena Sultan Muhammad Daud Syah telah berhasil mereka paksa untuk keluar hutan dengan teror.

Kealfaan lain dari Johannes Benedictus van Heutsz terkait masalah ini adalah meskipun sultan telah tertangkap oleh Belanda, namun perlawanan yang gigih terus berlangsung di Aceh sampai tahun 1942 saat Belanda menyerah tanpa syarat dan keluar

dari bumi Aceh. Perlawanan perang gerilya yang dipraktekkan pasukan Aceh sampai rentang waktu tersebut diatas ternyata sangat sukses mempersulit pasukan Belanda di Aceh.

Namun bagi Christian Snouck Hurgronje hal mengenai sultan Muhammad Daud Syah justru bukanlah hal yang menarik karena ia menganggap sultan bukanlah subjek penting dalam perjuangan Aceh saat beliau terpaksa menyerah. Silang pendapat dan pemikiran terus terjadi antara dua pemimpin pembuat rencana penaklukkan Aceh, Christian Snouck Hurgronje dan Johannes Benedictus van Heutsz. Christian Snouck Hurgronje mengkritisi kebijakan-kebijakan Johannes Benedictus van Heutsz yang tidak berdasarkan nasehatnya. Mengenai kritikan yang dilakukan oleh Christian Snouck Hurgronje dijelaskan dalam kutipan berikut.

Untuk membuat jalan dilakukan dengan kerja rodi, sementara aturan kerja rodi sudah resmi dihapuskan di berbagai tempat di Hindia-Belanda. Anggota-anggota keluarga dan para uleebalang yang bermusuhan ditahan sebagai sandera. Selain itu terjadi penyelewengan yang dilakukan dalam sensus penduduk, pemeriksaan kartu penduduk, pemeriksaan surat jalan dan pengadilan yang dilakukan semena-mena oleh para petugas yang tidak berpengalaman tetapi disertai tugas-tugas pemerintahan sipil yang tidak dikuasainya. (Harry Kawilarang, 2010: 144)

Berdasarkan petikan diatas ternyata Johannes Benedictus van Heutsz jelas-jelas melakukan pelanggaran besar dan fatal. Pembuatan jalan yang bukan untuk kepentingan rakyat dilakukan dengan tenaga kerja paksa untuk kepentingan penjajahan terhadap bangsa orang-orang yang justru mengerjakannya. Kebijakan ini menimbulkan permasalahan sosial dalam masyarakat Aceh, diantaranya berkurangnya jumlah laki-laki yang tinggal di perkampungan yang berdampak pada berkurangnya tenaga kerja untuk mengerjakan lahan pertanian

Rodi yang terjadi pada masa pemerintahan kolonial di Aceh, berdasarkan peraturan rodi 1898 adalah diluar kehendak adat...dengan memperlakukan rodi yaitu kerja paksa

tanpa upah penduduk merasa tertindas karena sistem kerja wajib merupakan pelaksanaan kerja berat di jalan raya tidak bersumber pada kebiasaan dan adat penduduk Aceh. (Munawiyah, 2007: 124)

Rodi merupakan salah satu kebijakan kolonialisme Belanda yang dijalankan oleh Johannes Benedictus van Heutsz dan kemudian mendapat sorotan yang tajam dari penasehat politiknya, Christian Snouck Hurgronje. Berbagai pekerjaan yang dianggap penting bagi kolonialisme digunakan jasa rodi seperti pembangunan jalan, pembangunan jembatan dan pembangunan lapangan olah raga. Harry Kawilarang, (2010: 143) menjelaskan bahwa: "...beda pandangan terjadi antara Snouck dan van Heutsz. Misalnya, van heutsz mengabaikan nasihat Snouck untuk tidak membangun lapangan pacuan kuda dengan kerja paksa"

Selain daripada keterangan pada petikan diatas Johannes Benedictus van Heutsz menggunakan kekerasan berupa penangkapan pada anggota keluarga pemimpin gerilyawan, dengan ancaman jika gerilyawan tersebut tidak menyerah maka sandera akan dibunuh atau diasingkan. Cara-cara seperti ini jelas membuat keguncangan dalam masyarakat yang semakin takut akan dijadikan sandera. Tindakan ini juga meninggalkan efek buruk bagi Belanda yaitu kebencian rakyat pada belanda semakin tertanam.

Pelanggaran lainnya adalah terjadi penyelewengan dalam sensus penduduk di Aceh. Sangat banyak orang-orang yang telah hilang dari perkampungannya karena kerja paksa rodi tetap dihitung seakan-akan jumlah penduduk tiada berkurang dan tidak bermasalah. Namun fakta yang sebenarnya adalah terdapat jumlah penduduk yang terus berkurang secara berkesinambungan akibat praktek kerja paksa, baik untuk kerja paksa membangun jalan, sebagai tameng dalam perang maupun dipekerjakan sebagai budak pengangkat logistik tentara Belanda untuk keperluan penyerangan. Pertumbuhan penduduk yang tidak sehat ditutupi demi kepentingan politik gubernur sipil dan militer, Johannes Benedictus van Heutsz.

Pemeriksaan kartu penduduk dan surat jalan dilakukan dengan sewenang-wenang

oleh petugas patroli. Orang yang tidak membawa kartu penduduk dan surat jalan akan ditahan. Orang yang dicurigai sebagai mata-mata pejuang aceh atau bersifat mencurigakan dimasukkan kedalam *kooi*, yang merupakan bangunan berbentuk bujur sangkar atau persegi panjang yang berfungsi sebagai penjara yang diperuntukkan bagi orang yang ditangkap dalam setiap operasi dan razia tentara Belanda.

Mengenai *kooi* tersebut dijelaskan dalam Nota Six bulan Mei dalam Muhammad Said (2007: 309) yaitu, memiliki tinggi 1 meter dan memiliki luas sekitar 3x4 meter. Dibawah, diatasnya dan sekitarnya dipasang kawat berduri yang beresiko mencederai orang-orang yang ditawan didalamnya. Untuk ruangan *kooi* sekecil itu diisi sekitar 30 tahanan yang didapat dari hasil patroli dan razia. Ini merupakan bentuk penyiksaan yang luar biasa dan sangat terlampaui melanggar hak-hak kemanusiaan. Dengan ukuran dan isi sedemikian sempit tidak jarang orang atau tahanan-tahanan yang berada didalam *kooi* tersebut mati karena terhimpit, kelaparan dan penganiayaan lainnya.

Dalam perkembangan selanjutnya mengenai hubungan Christian Snouck Hurgronje dan Johannes Benedictus van Heutsz harus diakui bahwa terjadi semakin jauh dari keakraban berpolitik sebagai ujung pengambil kebijakan kolonialisme Belanda di Aceh. Keduanya lebih sering terlibat silang pendapat yang berujung pada perpecahan.

Snouck Hurgronje menerima berita-berita dari Batavia. Telah banyak sekali terjadi perselisihan antara dia dan Van Heutsz, sudah surat-menyurat dengan kasar tentang soal-soal besar dan yang kecil-kecil, seperti membuat lapangan pacuan di Kutaraja secara paksa...Keadaan yang tidak jelas ketika Sultan menyerah menjadi titik batas. Snouck Hurgronje kembali ke Aceh dan melakukan penyelidikan pribadi di Sigli. Menurut Van Heutsz, kepada Sultan tidak ada dijanjikan apa-apa, dan tangan pemerintah tetap bebas. Di Sigli kenyataannya lain. Dari sini dan dari cara memperlakukan Muhammad Daud di Kutaraja bukan tidak beralasan Snouck Hurgronje menarik kesimpulan bahwa

Van Heutsz punya rencana rencana tertentu dengan Sultan. Bagi Snouck Hurgronje ini merupakan tikaman dalam politik Acehnya. Rupanya, sia-sia dia memperingatkan Van Heutsz sejak tahun 1892 agar jangan menilai terlalu penting arti kesultanan. (Paul van't Veer, 1985 : 205)

Berdasarkan kutipan diatas dapat dianalisis bahwa Christian Snouck Hurgronje terus mengamati perlakuan yang diberikan Johannes Benedictus van Heutsz terhadap Muhammad Daud Syah setelah berada dalam pengawasan Belanda. Johannes Benedictus van Heutsz masih saja memberinya kesempatan untuk memiliki peran dalam organisasi politik di Aceh.

Hal ini menurut Christian Snouck Hurgronjebahwa Johannes Benedictus van Heutsz telah bermain-main dengan kekuasaannya di Aceh dan memberikan kesulitan-kesulitan yang terkategori fatal bagi pemerintahan Belanda selanjutnya. Namun demikian tetap saja ia tidak menghiraukan segala bentuk protes maupun dan arahan yang diberikan penasehatnya itu. Hal-hal semacam ini bukanlah menjadi suatu keanehan sebab dalam diri Johannes Benedictus van Heutsz terdapat rasa percaya diri yang berlebihan.

D. Pertentangan dalam hal Strategi Penaklukan Aceh

Untuk menguasai wilayah Aceh, maka Belanda memerlukan strategi jitu yang dipandang sangat efektif untuk dijalankan. Strategi perang tersebut sangat bergantung pada duet pimpinan Belanda di Aceh, Christian Snouck Hurgronje dan Johannes Benedictus van Heutsz sebagai pengaturnya. Dalam permulaan kepemimpinan keduanya, terdapat pemahaman yang saling mendekati mengenai strategi penaklukan. "Jadi pendirian Snouck Hurgronje dan Van Heutsz sudah sama-sama mendekati. Lagi pula pendirian-pendirian itu tidak pernah saling berjauhan sekali" (Paul van't Veer, 1969: 236)

Dalam perkembangan selanjutnya, pertentangan strategi penaklukan terjadi diantara keduanya. Hal ini tidak terlepas dari latarbelakang profesi yang digeluti dua sosok

tokoh ternama di Aceh, Christian Snouck Hurgronje dan Johannes Benedictus van Heutsz. Dimana Christian Snouck Hurgronje memiliki dasar profesi orientalis beserta pemikiran-pemikiran yang mendasarinya.

Dasar pemikiran tersebut menjadi sumber pemikirannya mengenai strategi penaklukan. Christian Snouck Hurgronje memahami kapan harus melakukan serangan frontal pada basis-basis perlawanan Aceh dan kapan pula harus melakukan dan menerapkan politik Asosiasi sebagai pengimbangannya.

Sementara itu Johannes Benedictus van Heutsz memiliki konsep pemikiran militeris. Ia menganggap penaklukan Aceh hanya akan bisa direalisasikan dengan kekuatan senjata modern. Untuk itu kekuatan pasukan mutlak diperlukan tanpa tempo sekalipun. Mulai dari pembangunan armada tempur, prajurit, peralatan tempur berupa amunisi, meriam, karaben, dan senjata-senjata lainnya. Dalam pandangannya Penyerangan frontal merupakan strategi yang tidak bisa ditawar-menawar lagi. Karena bila hal itu tidak dilakukan maka, cita-cita menganeksasi Aceh adalah sesuatu yang mustahil belaka. Mengingat bahwa selama masa pertempuran tidak sedikit kerugian-kerugian yang diderita pasukan Belanda.

Salah satu strategi unggulan yang dijalankan oleh Johannes Benedictus van Heutsz untuk tujuan tersebut adalah pembantaian (*Genocide*), pembakaran perkampungan, perampasan harta benda masyarakat dan serangan frontal lainnya yang sangat merugikan. Kesemua hal tersebut menimbulkan traumatis yang mendalam bagi masyarakat Aceh.

.....semua ekspedisi dilakukan dengan membantai pemuka dan pemimpin pribumi yang melawan. Daerah yang ditaklukan berakhir dengan bumi hangus. Tidak ada istilah tawanan perang. Semua tawanan dibunuh...cara-cara tersebut bergema di tweed kamer (majelis rendah) di Den Haag yang menggambarkan: 'pembantaian sadis cara jenghiz khan dan Timur-Lenk (di Asia Barat) ternyata berulang kembali (di Aceh).' Perang Aceh selama 40 tahun menghabiskan sekitar dua per tiga jumlah penduduk. Multatuli menulis pada max havelaar sebuah syair pada sebuah desa

yang sudah di kuasai Belanda langsung dibakar.

(Harry Kawilarang, 2010: 142)

Berbagai peristiwa yang tertulis pada petikan diatas jelaslah cukup memberikan gambaran yang sangat akurat tentang perlakuan Belanda di Aceh. Bahwa Belanda suka melakukan praktik-praktik pembakaran perkampungan, pembunuhan terhadap pemimpin dan pemuka masyarakat, wanita dan anak-anak. Sehingga praktis jumlah masyarakat berkurang dengan sangat cepat. Banyak kampung-kampung yang kehilangan penduduknya sehingga juga kehilangan tenaga produktifnya untuk pengelolaan kampung. Untuk lebih jelas mengenai praktik-praktik kotor tersebut diberi gambaran sebagai berikut.

Keganasan van de Heijdjen, van Heutsz dan van Daalen telah membuat rakyat Aceh sebagai buruan di negeri sendiri, sehingga dendam kepada Belanda tak kunjung hilang. Oleh karena itulah dalam perang Aceh hampir tidak ada lagi kampung yang aman bagi serdadu Belanda...apabila serdadu dan pasukan marsose Belanda tersebar di seluruh pelosok Aceh tentulah perlawanan yang diberikan rakyat merata pula.(H.M.Thamrin.z, 2003: 145)

Penjelasan yang diberikan dalam petikan ini adalah meskipun Belanda melakukan tindakan-tindakan yang sangat keji dan layak disebut sebagai tindakan kejahatan perang, namun gerilyawan dan rakyat Aceh tetap tiada henti melakukan perlawanan sesuai dengan kemampuannya. Perlawanan yang diberikan rakyat sudah merata disegala lini dan wilayah baik di pesisir-pesisir maupun di pedalaman Aceh.

Selain daripada pertentangan yang berdasarkan pada dasar profesi, pertentanganyang yang disebabkan kepentingan pribadi juga melatarbelakangi ketidakharmonisan antara Christian Snouck Hurgronje dan Johannes Benedictus van Heutsz. Salah satu yang termasuk dari bagian poin ini adalah adanya konsep meninggalkan peran dan nasehat Christian Snouck Hurgronje dalam hal kebijakan politik dan kolonialisme.

Hal-hal seperti ini dilakukan karena Johannes Benedictus van Heutsz selaku gubernur sipil dan militer praktis mendapatkan keuntungan finansial dari operasi-operasi militer yang dijalankan. Setiap operasi militer yang dijalankan Johannes Benedictus van Heutsz akan terdapat praktek perampasan harta-benda masyarakat yang menjadi target Belanda. Hal-hal semacam ini terus berkelanjutan sampai akhir masa jabatannya sebagai Gubernur sipil dan militer di Aceh.

Sebagai pemegang tertinggi jabatan secara hierarki di Aceh, praktis Johannes Benedictus van Heutsz mendapatkan keuntungan pribadi secara finansial. Semakin banyak program sweeping (pembersihan) terhadap sekelompok perkampungan atau wilayah yang dicurigai sebagai penentang Belanda di Aceh maka semakin banyak pula harta-harta hasil rampasan yang diterimanya sebagai pemimpin dan panglima perang di Aceh. Ini pula yang menjadi salah satu faktor penolakannya terhadap implementasi politik Asosiasi yang direncanakan oleh Christian Snouck Hurgronje.

Puncak dari segala pertentangan yang terjadi antara duet pimpinan Christian Snouck Hurgronje dan Johannes Benedictus van Heutsz adalah pengiriman surat yang ditulis oleh Christian Snouck Hurgronje kepada Gubernur Jenderal William Rooseboom di Batavia. Surat tersebut berisi segala tindakan-tindakan kekejaman yang dilakukan Johannes Benedictus van Heutsz beserta pasukannya yang dianggapnya bertentangan dengan instruksinya.

Muhammad Said (2007: 303) menjelaskan ada delapan inti dari isi surat tersebut. Pertama, dalam penyerangan pasukan Belanda ke Tangse tahun 1898 semua kampung yang ditemui disana dipandang sebagai pertahanan musuh, sehingga oleh karena itu perlu dibakar habis. Menurut pandangan Christian Snouck Hurgronje, pasukan yang turut dalam pertempuran di Pidie (juni 1898-sampai September 1898) dihinggapi penyakit suka membakar, merompak serta mereka bergembira karena hal tersebut juga ternyata sesuai dengan gairah sang komandan, Johannes Benedictus van Heutsz.

Kedua, praktik penyiksaan terhadap para tawanan perang (gerilyawan Aceh) yang dilakukan oleh perwira-perwira yang ditugaskan untuk mencari informasi. Dalam tugas seperti itu mereka menggunakan rotan sebagai alat pukul untuk maksud keterangan yang dicari. Ketiga, Christian Snouck Hurgronje juga mengkritisi tentang adanya praktik rodi yang sangat merugikan masyarakat luas sehingga berakibat pada terlantarnya sawah dan ladang mereka yang juga berdampak pada terjadinya kekurangan pangan. Pengerjaan jalan secara paksa yang kemudian ternyata jalan tersebut tidak jadi dipakai.

Keempat, penduduk sipil dipekerjakan secara paksa untuk mengangkut pasukan militer yang terluka akibat pertempuran dengan pasukan Aceh. Hal semacam ini juga bukan tanpa kelanjutan yang merugikan masyarakat yang menjadi korban paksaan karena setelah pekerjaan tersebut seringkali diantara mereka itu ditempatkan sebagai budak pengangkut sebagaimana yang disebutkan '*dwangarbeiders*' atau orang perantaraan.

Kelima, penduduk Aceh dipaksa menjual ternaknya terutama ternak ayam, bebek untuk dijual kepada bivak dikampung bersangkutan dengan harga suka hati serdadu Belanda. Bahkan dalam praktik yang tidak jarang mereka mengambil secara paksa ternak-ternak tersebut. Christian Snouck Hurgronje menjelaskan dalam suratnya tersebut bahwa tindakan-tindakan yang dilakukan serdadu Belanda tersebut berakibat persediaan ayam di kutaraja berkurang dampak selanjutnya adalah harga ternak berupa ayam dan itik menjadi naik dipasaran.

Keenam, Christian Snouck Hurgronje juga menulis tentang kebuasan Belanda ketika mereka memasuki Gayo. Mereka melakukan razia ke perkampungan penduduk untuk mendapatkan tenaga kuli pengangkut logistik perang. Selanjutnya ia menjelaskan bahwa akibat tidak sanggup mengangkat beban yang diluar kesanggupannya banyak diantara korban-korban tersebut mati ditengah jalan lalu ditinggalkan begitu saja. Ketujuh, Christian Snouck Hurgronje menulis kritiknya mengenai adanya ketimpangan yang dilakukan Johannes Benedictus van

Heutsz dalam mengatur kenaikan pangkat bawahannya. Orang yang pintar menjilat padanya kerap mendapatkan kenaikan pangkat meskipun orang tersebut tidak memiliki kecakapan sebagai mana layaknya pemilik pangkat tersebut. Dan Johannes Benedictus van Heutsz juga menghambat karir bawahannya yang kurang disukainya meskipun ia memiliki kecakapan dan kualitas yang mumpuni.

Kedelapan, Christian Snouck Hurgronje menulis adanya praktik penyelewengan terhadap penggunaan uang kas yang kemudian sangat merugikan negara. Mengenai uang hasil rampasan dari pejuang dan dari perkampungan yang didenda sering salah dalam pemakaiannya termasuk digunakan untuk pembangunan sebuah klub di kutaraja.

Delapan poin dari inti surat Christian Snouck Hurgronje diatas merupakan puncak dari pertentangan keduanya yang berujung pada saling menjatuhkan yang dalam istilah Muhammad Said 'Belanda tuduh Belanda'. Lebih lanjut dalam pandangan Muhammad Said pembongkaran kejahatan-kejahatan yang dilakukan Christian Snouck Hurgronje adalah bagian dari upaya penjatuhan rekannya yang keras kepala, Johannes Benedictus van Heutsz sekaligus membersihkan namanya dari keterlibatan sebagai penasehat urusan Islam di Aceh.

.....karena Christian Snouck Hurgronje adalah seorang sarjana, maka diapun segera melihat bahayanya jika barang luntur dipamerkan terus-menerus. Disamping itu sebagai manusia yang ingin naik, dia juga tidak kurang ambisiusnya dari van Heutz. Jika orang yang semula dibayangkannya sebagai boneka yang dapat saja disuruh melakukan ini-itu menurut kehendaknya dapat naik, kenapa pula sang arsitek sendiri tidak turut memperoleh kenaikan. Disinilah sulitnya mengapa pada suatu ketika Snouck Hurgronje merasa perlu mencuci tangan setelah hari demi hari menembus keluar Aceh sebagaimana wilayah di bawah 'kekuasaan' van Heutsz tersebut 'diselesaikan' oleh keganasan serdadu Belanda. (Muhammad Said, 2007: 303)

Berdasarkan penjelasan yang dipaparkan dalam petikan ini bahwa nuansa kepentingan pribadi begitu jelas terdeskripsikan. Bagaimana tidak, penghargaan besar justru hanya teruntuk pada Johannes Benedictus van Heutsz atas kemenangannya pada perang di Pidie seakan-akan dia tidak memiliki peranan yang signifikan selama masa operasi militer di Aceh.

Bila kemuliaan yang seharusnya diperolehnya bersama Johannes Benedictus van Heutsz tidak didapatnya, Maka sebaliknya keburukan-keburukan yang juga bersumber dari kekejian perang Belanda di Aceh harus segera di tepis oleh Christian Snouck Hurgronje demi pembersihan namanya. Van Koningsveld (1989: 219) menjelaskan bahwa: ...menurut pandangan khalayak ia (Christian Snouck Hurgronje) sangat kurang menonjol sebagai penakluk Aceh. itulah sebabnya ia kalah pamor dengan Johannes Benedictus van Heutsz yang tak lain adalah seorang yang menjalankan strateginya diawal kepemimpinannya.

Kekurangan-kekurangan Christian Snouck Hurgronje yang dimaksud bersumber pada keberhasilan Johannes Benedictus van Heutsz mempertahankan pendiriannya yang keras dari rumusan penasehatnya. Meskipun cara-cara seperti ini tidak berlaku setiap saat pelaksanaan kebijakan.

Persekutuan besar pada tahun 1896 antara Christian Snouck Hurgronje dengan van Heutsz telah buyar sewaktu mereka itu memperoleh tanggung-jawab bersama mengenai jalannya urusan-urusan di Aceh. dua tokoh yang keras kepala yang sama-sama ingin berkuasa dan cakap, dua orang yang dalam segala hal ingin menang sendiri, yang seorang lancang mulut, penggembira dan suka berkelakar, kasar, sedang yang lainnya pendiam tetapi dapat menghancurkan lawan dengan hanya sebuah perkataan, yang suka berterus terang terhadap siapapun tanpa pandang bulu jika ia memainkan penanya diatas kertas. Persekutuan itu tidak dapat berjalan baik lagi dan memang tidak berjalan baik (Paul van't veer, 1969: 311)

Berdasarkan kutipan diatas dijelaskan mengenai karakter kedua tokoh sentral Belanda Christian Snouck Hurgronje dan Johannes Benedictus van Heutsz. Antara kedua karakter tersebut sebenarnya dapat dikatakan sebagai saling bertolak belakang yakni Snouck memiliki karakter yang tenang, pendiam dan cerdas dalam hal berdebat. Sementara van Heutsz memiliki karakter kasar, lancang dan arogan Maka setelah semua sederetan pertentangan itu terjadi hubungan keduanya berakhir dengan pecahnya duet kepemimpinan mereka di Aceh. yang selanjutnya hubungan antar keduanya tersebut tidak pernah kembali harmonis. Pada saat menjelang berakhirnya masa penugasannya di Aceh secara khusus dan Hindia Belanda, Christian Snouck Hurgronje menyalahkan perlakuan pemerintah Belanda yang dianggapnya kurang apresiatif atas sederetan prestasi kerjanya, jasa-jasanya untuk menegakkan hegemoni kolonialisme Belanda di Aceh dan Hindia-Belanda.

Pernyataan kekecewaan Christian Snouck Hurgronje tersebut kepada pemerintah Belanda dijelaskan dalam (Anwar Syarifuddin, 2012: 175) bahwa: "Sungguh saya kecewa kepada pemerintah (Kolonial Hindia Belanda) yang kurang memberikan penghargaan kepada saya, padahal saya telah mengorbankan hampir seluruh hidup saya untuk kepentingan mereka."

DAFTAR PUSTAKA

Ali Hasjmy, 1977, *Apa Sebab Rakyat Aceh Sanggup Berperang Puluhan Tahun Melawan Agresi Belanda*, Jakarta: Bulan Bintang

Anwar Syarifuddin, 2012, *Kajian Orientalis Terhadap al-Qur'an dan Hadist*, Jakarta : UIN

Daliman, 2012, *Metode Penelitian Sejarah*, Yogyakarta: Ombak

Dudung Abdurrahman, 2007, *Metode Penelitian Sejarah*, Yogyakarta: Ar-Ruzz

Media

Harry Kawilarang, 2010, *Aceh Dari Sultan Iskandar Muda Ke Helsinki*, Banda Aceh: Bandar Publishing

Ibrahim Alfian, 1988, *Perang Di jalan Allah Perang Aceh 1873-1912*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan

-----, 2005, *Wajah Aceh Dalam Lintasan Sejarah*, Yogyakarta: UGM Press

Mannan Buchari, 2006, *Menyingkap Tabir Orientalis*, Jakarta: Amzah

Muhammad Said, 2007, *Aceh Sepanjang Aceh 2*, Medan: Waspada

Munawiyah, 2007, *Birokrasi Kolonial Di Aceh 1903-1942*, Banda Aceh: Arraniry Press

Muliadi Kurdi, 2009, *Aceh Dimata Sejarawan*, Banda Aceh: LKAS

Reid, Anthony. 2007, *Asal Mula Konflik Aceh*, Jakarta: Obor

Ridwan Saidi, Rizki Ridyasmara, 2009, *Fakta Dan Data Yahudi Di Indonesia*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar

Rusdi Sufi,. Agus Budi Wibowo, 2008. *Perlawanan-Perlawanan Rakyat Di Sumatra Terhadap Kolonial Belanda*, Banda Aceh : Badan Arsip dan Perpustakaan Provinsi NAD

-----, 2009, *Pendidikan Aceh Dari Masa Ke Masa*, Banda Aceh : Badan Arsip dan Perpustakaan Provinsi NAD

Thamrin Z, Edy Mulyana, 2007, *Perang Kemerdekaan Aceh*. Banda Aceh : Badan Arsip dan Perpustakaan Provinsi NAD

Tim NPSI, 2010, *Sejarah Nasional Indonesia V*, Jakarta: Balai Pustaka

Van 'T Veer, Paul. 1969. *Perang Belanda di Aceh*. Amsterdam: N.V. Uitgeverij

-----, 1985, *Perang Aceh Kisah Kegagalan Snouck Hurgronje*, Jakarta: Temprint